

ABSTRAK

Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol tidak hanya berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat akses masyarakat kesuatu tempat juga sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di suatu daerah. Dalam proses pembebasan hak, pemilik tanah harus diberi rasa keadilan dan kepastian hukum dalam membayar kerugian secara adil dan menurut prosedur yang diatur oleh hukum. Untuk itu saya mengangkat judul penelitian “Kompensasi Tanah Pembangunan Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi Tahun 2013” untuk memahami perlindungan hukum yang dimiliki Pemkot dalam memperoleh tanah dan mekanisme penyelesaian masalah pengadaan tanah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi serta kepustakaan. Data yang didapatkan lalu dianalisis dengan kualitatif. Menurut Pasal 1 ayat 2 UU No. 2 Tahun 2012, perlindungan hukum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum mencakup memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak hukum yang diatur juga dalam Pasal 17 dan 18 dari Kepres No. 36 tahun 2005. Sesuai dengan UU No.2 Tahun 2012, proses pengadaan jalan tol Medan-Tebing Tinggi dimulai.

Kata Kunci: Ganti rugi; Tanah; Pembangunan Jalan Tol

ABSTRACT

Road Infrastructure Development Projects not only serve to facilitate and accelerate access to communities everywhere but also as a means to stimulate economic growth and tourism in a region. In the process of liberation of rights, landowners must be given a sense of justice and legal certainty in paying losses fairly and in accordance with the procedures regulated by law. For that I raised the title of the research “Compensation of Land Construction Road Tol Medan-Tebing High Year 2013” to understand the legal protection that Pemkot has in acquiring land and the mechanism of solving the problem of land acquisition. The

types of research used are normative juridic and qualitative descriptive. Techniques of data collection through interviews and observations and libraries. The data is collected and analyzed qualitatively. According to paragraph 2, no. 2 In 2012, the legal protection in land acquisition for the public interest includes the provision of fair and fair compensation to the legal party. Articles 17 and 18 of Kepres No. 36 of 2005 regulate the determination of damages. In accordance with the Law No. 2 of 2012, the process of procurement of highway tolls Field-Tebing began.

Keywords: Replace the loss; The land; Construction of road